

**PERAN DEWAN HAM PBB TERHADAP SANKSI HUKUMAN
MATI DALAM KASUS NARKOBA DI FILIPINA PADA MASA
PEMERINTAHAN PRESIDEN RODRIGO DUTERTE**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hubungan Internasional**



**UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA**

2020

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA**

PERNYATAAN KEASLIAN/ORIGINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (SKRIPSI) ini, adalah asli dan belum pernah penulis sajikan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Satya Negara Indonesia maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, ramusam, dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan Tim Pengaji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini penulis buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 3 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan,



(Danu Buntaran)
051601503125011

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA**

TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

NAMA : Danu Buntaran
NIM : 051601503125011
JUDUL : Peran Dewan HAM PBB Terhadap Sanksi Hukuman Mati
Dalam Kasus Narkoba Di Filipina Pada Masa
Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte
JURUSAN : Ilmu Hubungan Internasional
Telah disetujui oleh tim pembimbing untuk diajukan dalam sidang skripsi.
Menyetujui,
Jakarta, 3 Agustus 2020

Pembimbing II

Pembimbing I

(Syafril Alam, S.I.P., M.M.)

(Dr. Fitra Deni, S.H., M.Si.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dekan FISIP

(Pradono Budi Saputro, M.Si)

(Dr. Radita Gora Tayibnapis, S.Sos., M.M.)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA**

TANDA PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

NAMA : Danu Buntaran
NIM : 051601503125011
JUDUL : Peran Dewan HAM PBB Terhadap Sanksi Hukuman Mati
Dalam Kasus Narkoba Di Filipina Pada Masa
Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte
FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
JURUSAN : Ilmu Hubungan Internasional

Jakarta, 26 Agustus 2020

Menyetujui,

Ketua Penguji	Pradono Budi Saputro, M.Si.	
Anggota Penguji I	Dr. Fitra Deni, S.H., M.Si.	
Anggota Penguji II	Djoesep Hartat Tarigan, S.I.P., M.Si.	

Mengetahui,

Ketua Program Studi

(Pradono Budi Saputro, M.Si)

Dekan FISIP

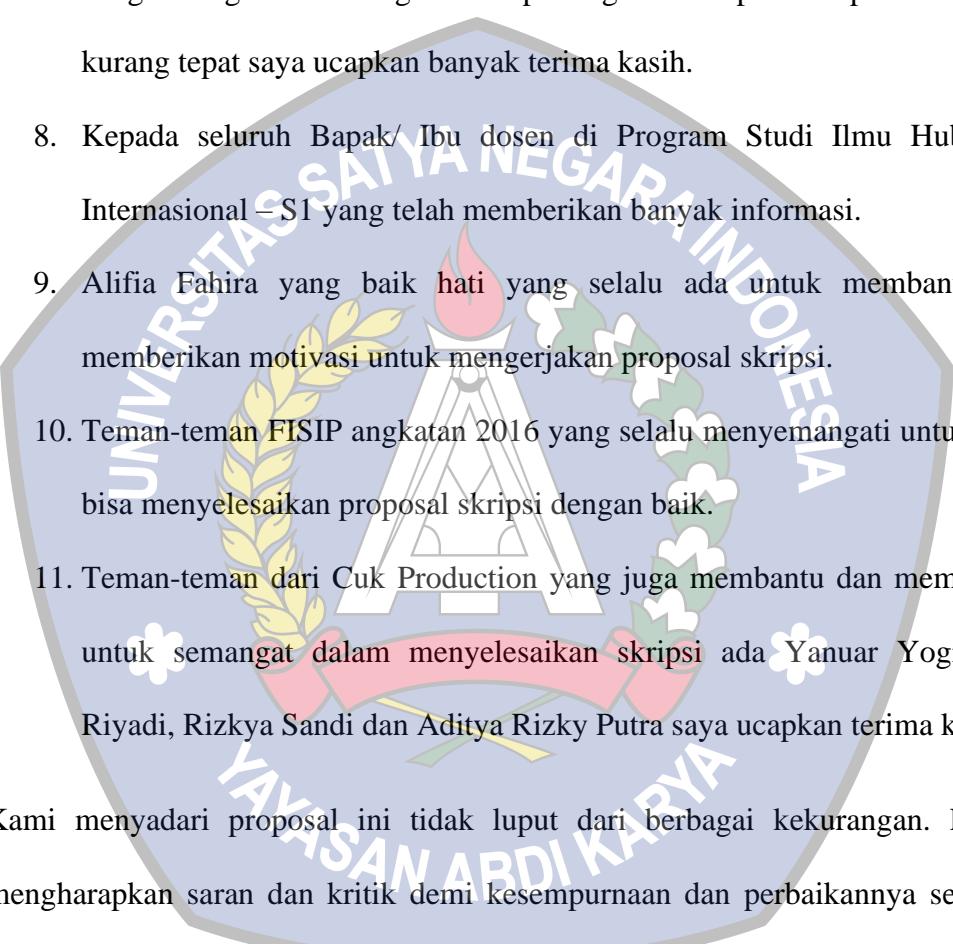
(Dr. Radita Gora Tayibnapis, S.Sos., M.M.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Peran Dewan HAM PBB Terhadap Sanksi Hukuman Mati Dalam Kasus Narkoba Di Filipina Pada Masa Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte”**.

Laporan proposal skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Satya Negara Indonesia. Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat melakukan penyusunan proposal skripsi ini.
2. Orang Tua yang selalu mendukung serta selalu memberikan motivasi dan mendoakan tanpa henti disetiap harinya.
3. Ibu Dra. Merry L. Panjaitan, MM, MBA, selaku Rektor Universitas Satya Negara Indonesia beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Radita Gora Tayibnapis, S.Sos, MM, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Satya Negara Indonesia.
5. Bapak Pradono Budi Saputro, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

- 
6. Ibu Dr. Fitra Deni, S.H., M.Si selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar membimbing penulis dan memberikan arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 7. Bapak Syafril Alam, S.I.P., M.M, selaku dosen pembimbing II yang dengan sangat teliti mengamati tiap bab guna memperbaiki penulisan yang kurang tepat saya ucapan banyak terima kasih.
 8. Kepada seluruh Bapak/ Ibu dosen di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional –S1 yang telah memberikan banyak informasi.
 9. Alifia Fahira yang baik hati yang selalu ada untuk membantu dan memberikan motivasi untuk mengerjakan proposal skripsi.
 10. Teman-teman FISIP angkatan 2016 yang selalu menyemangati untuk terus bisa menyelesaikan proposal skripsi dengan baik.
 11. Teman-teman dari Cuk Production yang juga membantu dan memotivasi untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ada Yanuar Yogi, Fani Riyadi, Rizky Sandi dan Aditya Rizky Putra saya ucapan terima kasih.

Kami menyadari proposal ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Jakarta, 3 Agustus 2020

Danu Buntaran

PERAN DEWAN HAM PBB TERHADAP SANKSI HUKUMAN MATI DALAM KASUS NARKOBA DI FILIPINA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN RODRIGO DUTERTE

xiv Halaman + 82 Halaman + 20 Buku + 19 Jurnal + 2 Skripsi + 21 Website

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran Dewan HAM PBB terhadap cara-cara yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte dalam menangani para pengguna narkoba. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran narkoba di Filipina yang terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga Presiden Rodrigo Duterte menyikapi masalah tersebut dengan berbagai cara seperti hukuman mati dan membuat program *Operation Double Barrel* yang bertujuan untuk memberantas pengguna narkoba dengan mengirim anggota polisi militer ke setiap rumah-rumah sesuai daftar nama yang telah ada. Melihat peristiwa tersebut, maka dibuatlah pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana peran Dewan HAM PBB dalam menangani pelanggaran HAM dalam kasus narkoba di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte?”. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui tentang peran yang dilakukan Dewan HAM PBB untuk menyikapi masalah hukuman mati di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah Dewan HAM PBB dalam menyikapi hukuman mati yang ada di Filipina dengan membuat resolusi. Resolusi tersebut bertujuan untuk membuat Filipina berhenti melakukan proses hukuman mati tersebut. Dilain sisi adanya upaya yang tidak disetujui oleh pemerintahan Filipina terkait resolusi tersebut. Resolusi itu dinilai mencoba mengintervensi Filipina dan mencampuri kedaulatan negara. Adapun hambatan yang ada yaitu adanya ASEAN WAY yang membuat resolusi tersebut terhambat karena dalam program itu, negara-negara luar ataupun organisasi internasional tidak dapat mencapai urusan negara anggota ASEAN WAY. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut yaitu resolusi sejauh ini bisa berjalan lancar dengan beberapa permintaan terhadap pemerintahan Filipina. Dengan dibuatnya resolusi membuat pemerintahan Filipina menjadi lebih memperhatikan hal-hal yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB sehingga proses kebijakan terkait perang Anti-narkoba terhenti untuk sementara waktu.

Kata Kunci : Filipina, Hukuman Mati, HAM, Dewan HAM PBB

**THE ROLE OF THE UN HUMAN COUNCIL TOWARD DEATH
PENALTY SANCTIONS IN DRUG CASE IN THE PHILIPPINES
DURING THE GOVERNMENT OF PRESIDENT RODRIGO
DUTERTE**

**xiv Pages + 82 Pages + 20 Books + 19 Journals + 2 Undergraduates Theses +
21 Websites**

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the UN Human Rights Council in the ways President Rodrigo Duterte treats drug users. This research is motivated by the rampant drug trafficking in the Philippines which continues to increase from year to year so that President Rodrigo Duterte has addressed this problem in various ways such as the death penalty and the Operation Double Barrel program which aims to eradicate drug users by sending members of the military police to every home, house according to the existing list of names. Seeing this incident, a research question was raised, namely "What is the role of the UN Human Rights Council in dealing with human rights violations in drug cases in the Philippines during the administration of President Rodrigo Duterte?" The purpose of this study is to find out about the role played by the UN Human Rights Council in addressing the issue of the death penalty in the Philippines during the administration of President Rodrigo Duterte. The method used to conduct this research is a qualitative method. The research result obtained is that the UN Human Rights Council is addressing the death penalty in the Philippines by making a resolution. The resolution aims to make the Philippines stop carrying out the death penalty process. On the other hand, there were efforts that the Philippine government did not agree with regarding the resolution. The resolution is considered to be trying to intervene in the Philippines and interfere with the country's sovereignty. As for the existing obstacles, namely the existence of ASEAN WAY which hampered the resolution because in the program, foreign countries or international organizations could not interfere with the affairs of ASEAN WAY member countries. The conclusion obtained from the research results is that the resolution so far has been running smoothly with several requests from the Philippine government. With the drafting of the resolution, the Philippine government paid more attention to the things that were done by the UN Human Rights Council so that the policy process related to the Anti-drug war was temporarily suspended.

Keywords : Philippines, Death Penalty, Human Rights, UN Human Rights Council